

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Quran dan Terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta,

Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahaan Bertehnologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad M Ramli, 1994, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung.

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Widjaja, Jakarta.

Andasasmita Komar, 1984, *Notaris I*, Sumur, Bandung.

Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.

Cst Kansil, Christine S.t Kansil,Engelien R,Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

-----, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas* , Jala Permata Aksara, Jakarta.

Gatot Supramono 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2008, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT* , Praninta Offset, Jakarta.

Habib Adji, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet.1, Refika Aditama, Bandung.

-----, 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia* , PT Refika Aditama, Bandung.

- H.M.N. Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* Djambatan, Jakarta.
- I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan*, Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc, Bekasi Indonesia.
- J. Satrio, S.H, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono , 2006, dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama Bandung.
- L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- M. Yahya Harahap SH, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grfika, Jakarta.
- , 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Subekti, 1978, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2007, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No.3, Bandung.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum. Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, PT.Eresco, Bandung.
- Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- S Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Gofindo, Jakarta.
- Supramono Gatot, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta.
- Udin Silalahi, 2005, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, Iblam, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Undang-undang Republik Indonseia Nomor 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Nomor 7 tahun 1982
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 13 tahun 1995 ,Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3587

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 106 tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4765

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembar Negara Nomor 58 tahun 2008

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Lembar Negara Nomor 166 tahun 2008

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Nomor 157 tahun 2009

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 26 Tahun 1998 LN No. 39 Tahun 1998, TLN No. 3740, Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Daftar Perseroan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata.

C. Makalah

Tumbuan, Fred B.G. *Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas* , Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi UUPT , Jakarta, tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta.

D. Internet

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas

<http://www.ahu.go.id>

<http://www.birojasapembuatanpt.com/2014/09/pengertian-akta-notaris.html>

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-notaris-definisi-syarat.html>

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Pesan Nama Perseroan
- Lampiran 2 : Bukti Pemesanan Voucher Badan Hukum
- Lampiran 3 : Surat Perintah Bayar BN/TBN Terhadap PT
- Lampiran 4 : Detail Transaksi Data Perseroan
- Lampiran 5 : SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum
- Lampiran 6 : Contoh SK Kementerian Pengesahan Badan Usaha



DITJEN AHU

**BUKTI PESAN NAMA PERSEROAN
JUM MUARA KASIH
TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENTERI**

Nomor Pemesanan Nama	:
		<i>nomor ini untuk pengisian surat pendaftaran</i>
Nama Perseroan	:	..
Nama Singkatan	:	..
Tanggal Pemesanan	:	06 November 2015
Tanggal Kadaluarsa	:	05 Januari 2016
Nomor Kode Pembayaran	:
Nama Pemesan	:
Nomor Telepon Pemesan	:	[
Email Pemesan	:



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
BADAN HUKUM
Pengesahan Badan Hukum Perseroan

KODE VOUCHER :
NAMA PEMOHON :
EMAIL PEMOHON : @gmail.com
NOMOR HP :
TANGGAL TRANSAKSI : 23 November 2015 10:14:32
TANGGAL EXPIRED
(PEMBAYARAN TERAKHIR) : 25 November 2015 23:59:00
TAGIHAN : Rp 000

**SURAT PERINTAH BAYAR BN/TBN
TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN
JUM MUARA KASIH**

No. Transaksi	:	
Virtual Account TBNRI & BNRI	:	
Nama NOTARIS	:	
Nama PERSEROAN	:	
Nama Singkatan	:	
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:	SULAWESI TENGGARA
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:	KABUPATEN KOLAKA
Jenis Permohonan	:	Pendirian Perseroan
Biaya TBNRI	:	RP 500.000
Biaya BNRI	:	RP 30.000
Total	:	RP 580.000

Link Tagihan PNRI merupakan link untuk melakukan download Perintah Bayar BN/TBN RI ke PNRI. Link tersebut tetap akan tampil walaupun pembayaran telah dilakukan karena belum tersedianya Sistem Elektronik di PNRI sehingga antara Sistem AHU dan PNRI belum terhubung.

Detail Transaksi Perseroan

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan : JUNI MELARA KASIH
 Nama Singkatan : JMK
 Jenis Perseroan : TAMUM
 Jangka Waktu Perseroan : TIDAK TERBATAS
 Status Perseroan : TERTUTUP

DATA NOTARIS

Nama Notaris :
 Nomor Akta :
 Tanggal Akta :

KEDUDUKAN PERSEROAN

Alamat :
 Kecamatan :
 Kabupaten : KABUPATEN KOLAKA
 Provinsi : SULAWESI TENGGARA

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Perdagangan
 Tujuan : Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor

Maksud : Perdagangan
 Tujuan : Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Motor

Maksud : Transportasi dan Pergudangan
 Tujuan : Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan

Maksud : Konstruksi
 Tujuan : Konstruksi Gedung

Maksud : Konstruksi
 Tujuan : Konstruksi Bangunan Sipil

Maksud : Jasa Persewaan, Ketenaga Kerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
 Tujuan : Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya

MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 0	30	Rp. 0.000

MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 0	30	Rp. 0.000

MODAL DISEYOR

Rp. 1.000.000

Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
	KOMISARIS	-	J	Rp. 00
	DIREKTUR	-	J	Rp. 00



